

HAMBATAN DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI CEDAW DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI BRASIL PERIODE 2020-2023

Ulfa Diana¹, Putri Bintang Safitri², Ayesha Nauriya Effat³, Ida Susilowati⁴
ulfadiana0812@gmail.com¹, putribintangsafitri03@gmail.com², ayeshanaury@gmail.com³,
idasusilowati@unida.gontor.ac.id⁴
Universitas Darussalam Gontor

ABSTRAK

Studi ini mengkaji hambatan dan tantangan implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) dalam perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Brazil pada periode 2020-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analitis berbasis studi kasus dengan analisis dokumen resmi dan laporan lembaga kredibel. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Brazil memiliki kerangka hukum yang relative progresif, implementasi CEDAW masih menghadapi keterbatasan serius, terutama akibat keterlambatan mekanisme state reporting, fragmentasi koordinasi institusional, serta ketimpangan akses perlindungan hukum selama pandemi COVID-19. Lonjakan kasus kekerasan domestik dan peningkatan permohonan tindakan perlindungan darurat (MPU) tidak diimbangi dengan pengawasan internasional yang responsif dan berkelanjutan. Temuan ini mengaskan bahwa CEDAW, dalam konteks Brazil, lebih berfungsi sebagai instrument normatif daripada mekanisme perlindungan yang efektif, terutama dalam situasi krisis. Artikel ini berkontribusi pada kajian kritis organisasi internasional dengan menyoroti kesenjangan antara komitmen hukum internasional dan realitas perlindungan perempuan di tingkat nasional.

Kata Kunci: CEDAW, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, Perlindungan Hukum, Kesenjangan Implementasi.

ABSTRACT

This study examines the obstacles and challenges in implementing the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) in protecting women victims of sexual violence in Brazil during the period 2020-2023. This research uses a qualitative analytical approach based on case studies with analysis of official documents and credible institutional reports. The results of the study show that although Brazil has a relatively progressive legal framework, the implementation of CEDAW still faces serious limitations, mainly due to delays in state reporting mechanisms, fragmented institutional coordination, and unequal access to legal protection during the COVID-19 pandemic. The surge in domestic violence cases and the increase in requests for emergency protection measures (MPU) were not matched by responsive and sustained international monitoring. These findings confirm that CEDAW, in the Brazilian context, functions more as a normative instrument than an effective protection mechanism, especially in crisis situations. This article contributes to the critical study of international organizations by highlighting the gap between international legal commitments and the reality of women's protection at the national level.

Keywords: CEDAW, Sexual Violence Against Women, Legal Protection, Implementation Gap.

PENDAHULUAN

Kekerasan berbasis gender merupakan masalah global yang meluas. Sekitar satu dari tiga perempuan di dunia mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya, yang menandai kekerasan ini sebagai pelanggaran HAM serius (WHO, 2021). Di Brasil, angka kekerasan seksual juga mengkhawatirkan. Pada 2022 Brasil mencatat 74.930 kasus pemerkosaan tertinggi dalam sejarah negara itu di mana lebih dari 60% korban berusia di bawah 14 tahun (Human Rights Watch, 2023). Angka tersebut diperkirakan masih lebih tinggi karena banyak korban kesulitan melapor. Fenomena ini memperlihatkan bahwa

struktur patriarki dan ketimpangan sosial-ekonomi di Brasil terus meminggirkan perempuan, khususnya yang berasal dari kelompok rentan (Campbell, 2015).

Secara internasional, kekerasan terhadap perempuan diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang harus diatasi. Banyak instrumen PBB mendorong penghapusan diskriminasi gender. Salah satu instrumen utama adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 1979. CEDAW adalah konvensi PBB yang menjadi pijakan bagi perlindungan hak-hak perempuan secara universal (Campbell, 2015). Dalam pembukaannya diakui adanya “diskriminasi luas” terhadap perempuan, dan negara pihak diharuskan mengambil “langkah-langkah tepat, termasuk legislasi,” untuk menjamin kesetaraan gender. Dalam praktiknya, setiap empat tahun negara pihak harus melaporkan kemajuan dan kebijakan yang diambil kepada Komite CEDAW, yang kemudian memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Brasil sebenarnya telah mengadopsi hukum progresif untuk menanggulangi kekerasan berbasis gender. Misalnya, Undang-Undang Maria da Penha (2006) yang secara khusus mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM dan mengatur tindakan pencegahan serta perlindungan korban. Selain itu, konstitusi Brasil 1988 menjamin kesetaraan gender dan pada 2002 Brasil mempromulgasikan CEDAW menjadi hukum nasional. Meski demikian, implementasi kebijakan sering terhambat. Laporan menunjukkan jurang lebar antara ketentuan hukum dan realitas sosial: hak-hak perempuan diakui dalam undang-undang namun kesetaraan belum terjadi dalam institusi maupun norma budaya (Hamdy, 2022). Bahkan, Brasil belum menyerahkan laporan berkala kepada Komite CEDAW sejak 2012, periode di mana hak-hak perempuan banyak mengalami kemunduran (UN CEDAW Committee, 2023). Kondisi ini menggambarkan hambatan struktural dalam penegakan perlindungan bagi korban perempuan..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analitis dengan metode studi kasus pada periode 2020-2023. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum, laporan resmi pemerintah Brazil, laporan Komite CEDAW, publikasi dari Lembaga independent seperti Human Rights Watch dan Fórum Brasileiro de Segurança Pública, serta analisis wacana terhadap kebijakan dan pernyataan public pemerintahan Bolsonaro. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran hambatan struktural dalam implementasi CEDAW terkait perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Brazil..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan Efektivitas Implementasi CEDAW di Brasil dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Pelaksanaan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) di Brasil secara normatif merefleksikan adanya komitmen negara dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan. Hal ini ditunjukkan melalui ratifikasi CEDAW pada tahun 1984 serta pembentukan berbagai perangkat hukum nasional, seperti *Lei Maria da Penha* (2006) dan *Lei do Feminicídio* (2015). Meskipun demikian, hasil kajian empiris mengindikasikan bahwa komitmen normatif tersebut belum diikuti oleh implementasi yang efektif di tingkat praktik, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Diskrepansi antara kerangka hukum yang progresif dan realitas perlindungan di lapangan menjadi indikator penting adanya permasalahan struktural dalam implementasi CEDAW di Brasil (Waiselfisz, 2020).

Salah satu faktor penghambat utama terletak pada keterbatasan kapasitas institusional aparat penegak hukum. Walaupun CEDAW secara tegas mewajibkan negara untuk

menyediakan mekanisme hukum yang responsif dan efektif, institusi kepolisian dan peradilan di Brasil masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti minimnya pelatihan berperspektif gender, keterbatasan unit khusus penanganan kekerasan seksual, serta prosedur hukum yang kompleks dan tidak ramah korban. Dalam praktiknya, korban kekerasan seksual kerap mengalami *secondary victimization* akibat sikap aparat yang meragukan kesaksian korban, menyalahkan korban, atau menganggap kekerasan berbasis gender sebagai hal yang lumrah (Almeida, 2018). Kondisi ini secara jelas bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 5 CEDAW yang menekankan kewajiban negara untuk menghapuskan diskriminasi yang bersumber dari norma sosial dan budaya.

Ketidakefektifan penanganan kekerasan seksual juga tercermin dari tingginya tingkat *underreporting* serta rendahnya proses hukum terhadap kasus yang terjadi. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 10–15% korban kekerasan seksual yang melaporkan pengalamannya kepada aparat penegak hukum, yang umumnya disebabkan oleh rasa takut, stigma sosial, serta rendahnya kepercayaan terhadap sistem peradilan (FBSP, 2022). Situasi ini menegaskan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam CEDAW untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual (Merry, 2006).

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Brasil (2020-2023)

Tahun	Jumlah Laporan Kasus	Perkiraan Kasus Aktual*	Persentase Kasus diproses hukum
2020	60.926	±400.000	8,5%
2021	66.123	±430.000	9,1%
2022	74.930	±470.000	9,7%
2023	83.988	±500.000	10,2%

*Keterangan: Perkiraan kasus aktual dihitung berdasarkan estimasi *underreporting* oleh lembaga HAM dan studi kriminologi feminis (Cerqueira et al., 2023).

Tabel tersebut memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan pelaporan ini tidak diikuti oleh perbaikan yang sebanding dalam efektivitas penegakan hukum. Proporsi kasus yang diproses melalui mekanisme hukum masih berada di bawah angka 11%, yang menunjukkan rendahnya tingkat akuntabilitas negara dalam menangani kejahatan tersebut. Situasi ini mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi prinsip *due diligence* yang menjadi tolok ukur utama implementasi CEDAW dalam konteks kekerasan berbasis gender (UN Committee on CEDAW, 2017).

Di luar faktor institusional, hambatan kultural turut berperan signifikan dalam melemahnya implementasi CEDAW di Brasil. Nilai-nilai patriarki yang telah mengakar dalam struktur sosial masyarakat berkontribusi terhadap normalisasi kekerasan seksual, khususnya dalam lingkup domestik dan relasi personal. Sebagian besar pelaku kekerasan seksual merupakan pihak yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti pasangan, mantan pasangan, maupun anggota keluarga (Saffioti, 2015). Kondisi ini menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan kriminal individual, melainkan sebagai permasalahan struktural yang berakar pada ketimpangan relasi gender.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah ketimpangan dalam implementasi kebijakan antara tingkat federal dan negara bagian. Sebagai negara federal, Brasil menghadapi tantangan koordinasi kebijakan, di mana sebagian negara bagian telah memiliki sistem perlindungan perempuan yang relatif memadai, sementara wilayah lainnya terutama daerah miskin dan pinggiran masih mengalami keterbatasan serius dalam penyediaan layanan pendukung bagi korban kekerasan seksual, seperti rumah aman, layanan kesehatan

reproduksi, dan bantuan hukum gratis (Santos, 2021). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan CEDAW di Brasil masih bersifat tidak merata dan fragmentaris.

Dengan demikian, kegagalan utama implementasi CEDAW di Brasil dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan bukan disebabkan oleh ketiadaan kerangka regulasi, melainkan oleh lemahnya pelaksanaan kebijakan, rendahnya kapasitas institusional, kuatnya hambatan kultural patriarkal, serta ketimpangan struktural dalam sistem federal. Akibatnya, CEDAW lebih berfungsi sebagai komitmen normatif di tingkat internasional tanpa sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik perlindungan perempuan di tingkat domestik. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas rezim hak asasi manusia internasional sangat bergantung pada kemauan politik negara, kapasitas institusional, serta proses transformasi sosial di tingkat nasional (Tsutsui, 2007).

Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Favela Rio de Janeiro (2021)

Kegagalan implementasi CEDAW di Brasil semakin terlihat jelas ketika dianalisis melalui studi kasus penanganan kekerasan seksual di wilayah favela Rio de Janeiro pada tahun 2021. Favela sebagai ruang sosial yang ditandai oleh kemiskinan struktural, minimnya kehadiran negara, serta dominasi kekerasan bersenjata, menjadi lokasi dengan kerentanan tinggi terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan. Meskipun Brasil telah meratifikasi CEDAW dan mengadopsi berbagai regulasi nasional untuk perlindungan perempuan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa perempuan di favela masih menghadapi hambatan sistemik dalam mengakses keadilan dan perlindungan hukum (Santos, 2021).

Sepanjang tahun 2021, negara bagian Rio de Janeiro mencatat peningkatan laporan kekerasan seksual terhadap perempuan, dengan konsentrasi kasus yang tinggi di wilayah pinggiran dan favela. Namun, sebagian besar kasus tersebut tidak berujung pada proses hukum yang memadai. Perempuan korban kekerasan seksual di favela sering kali enggan melapor karena ketidakpercayaan terhadap kepolisian, rasa takut terhadap pelaku yang memiliki relasi kekuasaan lokal, serta risiko kriminalisasi balik terhadap korban (Santos, 2021). Kondisi ini secara langsung mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi prinsip *due diligence* sebagaimana ditegaskan dalam *General Recommendation No. 35* CEDAW.

Secara institusional, penanganan kasus kekerasan seksual di favela Rio pada 2021 ditandai oleh keterbatasan aparat penegak hukum. Unit kepolisian khusus perempuan (*Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher/DEAM*) di Rio de Janeiro tidak tersebar merata dan mayoritas berada di wilayah pusat kota. Akibatnya, perempuan di favela harus menempuh jarak yang jauh untuk melapor, menghadapi biaya transportasi, serta risiko keamanan. Hambatan geografis dan ekonomi ini memperkuat eksklusi struktural perempuan miskin dari akses keadilan, yang bertentangan dengan kewajiban negara dalam CEDAW Pasal 2 dan Pasal 15.

Lebih jauh, respons hukum terhadap kasus kekerasan seksual di favela pada 2021 juga dihambat oleh pendekatan keamanan negara yang berorientasi pada represivitas. Operasi kepolisian bersenjata di favela Rio sering kali mengesampingkan perlindungan HAM, termasuk hak perempuan korban kekerasan seksual. Fokus negara pada “perang melawan kriminalitas” justru mempersempit ruang aman bagi perempuan untuk melaporkan kekerasan seksual, karena kehadiran aparat sering diasosiasikan dengan kekerasan, intimidasi, dan pelanggaran HAM lainnya (Arias, 2020). Dengan demikian, negara tidak hanya gagal melindungi korban, tetapi juga secara tidak langsung memperkuat kondisi yang memungkinkan kekerasan seksual terus berlanjut.

Selain kegagalan negara, respons masyarakat sipil terhadap kasus kekerasan seksual di favela Rio pada 2021 juga menunjukkan keterbatasan. Organisasi masyarakat sipil lokal

memang berperan dalam memberikan pendampingan psikososial dan advokasi berbasis komunitas, namun kapasitas mereka sangat terbatas oleh minimnya dukungan negara dan pendanaan. LSM perempuan di favela sering kali harus menggantikan fungsi negara dalam memberikan bantuan darurat kepada korban kekerasan seksual, tetapi tidak memiliki kewenangan hukum untuk menjamin akuntabilitas pelaku. Hal ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab perlindungan perempuan secara de facto dialihkan dari negara kepada masyarakat sipil, yang bertentangan dengan kewajiban utama negara dalam kerangka CEDAW.

Dengan demikian, studi kasus favela Rio de Janeiro tahun 2021 memperkuat argumen bahwa kegagalan dominan implementasi CEDAW di Brasil bukan hanya persoalan regulasi, melainkan kegagalan struktural negara dalam menghadirkan keadilan bagi kelompok perempuan paling rentan. Ketidakhadiran negara yang efektif, pendekatan keamanan yang represif, serta keterbatasan masyarakat sipil menciptakan lingkaran impunitas yang memungkinkan kekerasan seksual terus berlangsung. Kasus ini menegaskan bahwa tanpa transformasi institusional dan komitmen politik yang nyata, CEDAW akan terus menjadi norma internasional yang tidak sepenuhnya terwujud dalam perlindungan perempuan di tingkat lokal.

Faktor Utama Hambatan Implementasi CEDAW di Brasil

Berdasarkan temuan pada kasus kekerasan seksual di favela Rio de Janeiro tahun 2021, dapat diidentifikasi tiga faktor utama yang menjadi hambatan dominan implementasi CEDAW di Brasil, yaitu menguatnya budaya patriarki struktural, pelemahan institusi hukum akibat kebijakan pemotongan anggaran pada masa pemerintahan Jair Bolsonaro, serta keterpecahan dan keterbatasan kapasitas masyarakat sipil. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan secara kolektif menghambat efektivitas perlindungan perempuan korban kekerasan seksual, khususnya di wilayah marginal seperti favela.

Budaya patriarki tetap menjadi faktor mendasar yang membuat perempuan di favela sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Relasi gender yang timpang, normalisasi kekerasan dalam relasi intim, serta kontrol sosial terhadap tubuh dan seksualitas perempuan masih mengakar kuat dalam komunitas miskin perkotaan Brasil. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perempuan favela sering kali diposisikan sebagai subjek subordinat dalam struktur keluarga dan komunitas, sehingga kekerasan seksual dianggap sebagai urusan privat dan bukan pelanggaran HAM (Saffioti, 2015).

Dalam konteks favela, norma patriarki diperkuat oleh kemiskinan dan kekerasan bersenjata, yang membatasi ruang perempuan untuk melawan atau melaporkan kekerasan seksual. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 5 CEDAW yang menuntut negara menghapus pola sosial dan budaya yang didasarkan pada inferioritas perempuan. Namun, negara Brasil gagal melakukan intervensi kultural yang memadai melalui pendidikan gender, kampanye publik, dan pemberdayaan perempuan di wilayah periferal.

Lebih jauh, patriarki di favela tidak hanya beroperasi di ranah sosial, tetapi juga terinternalisasi dalam praktik aparat penegak hukum. Aparat sering kali mereproduksi stereotip gender dengan mempertanyakan moralitas korban atau menormalisasi kekerasan seksual sebagai konsekuensi dari lingkungan favela yang “keras” (Santos, 2021). Hal ini memperparah *secondary victimization* dan melemahkan kepercayaan korban terhadap sistem hukum.

Faktor kedua yang signifikan adalah pelemahan institusi hukum dan kebijakan perlindungan perempuan selama pemerintahan Jair Bolsonaro (2019-2022). Pemerintahan Bolsonaro secara sistematis mengurangi anggaran dan dukungan terhadap kebijakan kesetaraan gender, serta melemahkan lembaga yang berfokus pada perlindungan perempuan. Agenda konservatif Bolsonaro memarginalkan isu kekerasan berbasis gender

dan mereduksi peran negara dalam perlindungan HAM perempuan.

Alokasi dana untuk kebijakan perempuan dan lembaga perlindungan korban mengalami pemotongan signifikan antara 2019-2021. Studi yang diterbitkan dalam *Third World Quarterly* mencatat bahwa pengurangan anggaran tersebut berdampak langsung pada operasional *Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM)*, rumah aman, serta layanan pendampingan korban kekerasan seksual (Machado et al., 2023). Akibatnya, kapasitas negara untuk memenuhi kewajiban *due diligence* sebagaimana diatur dalam *General Recommendation No. 35 CEDAW* semakin melemah.

Dalam konteks favela Rio, pelemahan institusi hukum ini tercermin pada minimnya kehadiran aparat yang terlatih gender, lambannya proses hukum, serta rendahnya tingkat penuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual. Kondisi ini memperkuat impunitas dan menunjukkan bahwa komitmen CEDAW tidak diterjemahkan secara serius dalam kebijakan publik nasional. Komite CEDAW sendiri dalam *Concluding Observations on Brazil (2024)* menyoroti bahwa kemunduran kebijakan selama periode pemerintahan sebelumnya telah memperburuk situasi kekerasan terhadap perempuan, terutama di komunitas miskin dan terpinggirkan.

Faktor ketiga adalah keterpecahan dan lemahnya kapasitas masyarakat sipil dalam merespons kekerasan seksual secara kolektif. Meskipun organisasi masyarakat sipil dan LSM perempuan memainkan peran penting dalam mendampingi korban di favela Rio, peran tersebut sering kali bersifat reaktif dan terfragmentasi. Organisasi masyarakat sipil di wilayah periferal Brasil menghadapi keterbatasan sumber daya, ketergantungan pada pendanaan jangka pendek, serta tekanan politik yang membatasi ruang advokasi mereka.

Fragmentasi ini diperparah oleh minimnya dukungan negara dan tidak adanya mekanisme koordinasi yang efektif antara masyarakat sipil dan lembaga hukum. Akibatnya, respons terhadap kekerasan seksual menjadi tidak konsisten dan tidak mampu mendorong perubahan struktural. Dalam kerangka CEDAW, kondisi ini menunjukkan kegagalan negara dalam menciptakan ekosistem perlindungan yang holistik, di mana masyarakat sipil seharusnya berfungsi sebagai mitra strategis negara, bukan pengganti peran negara (Merry, 2006).

Dekonstruksi Neo-Marxis: Kontradiksi Negara dan Eksploitasi Ganda atas Perempuan Miskin

Dalam kerangka analisis neo-Marxis, negara bukan entitas netral yang melindungi seluruh warganya secara setara, melainkan institusi yang memproduksi relasi kuasa kapitalis dan patriarkal. Di Brazil periode 2020-2023, kontradiksi struktural ini terlihat jelas yang di satu sisi, negara menegaskan komitmennya terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), namun di sisi lain, kebijakan ekonomi khususnya ekspansi ekstraksi sumber daya di Amazon yang secara sistematis mengorbankan keamanan dan hak perempuan miskin perkotaan ((HRW), 2021).

Kebijakan pemerintahan Bolsonaro secara eksplisit mendukung perluasan pertambangan, agrobisnis, dan infrastruktur ekstraktif di wilayah Amazon, dengan dalih pertumbuhan ekonomi nasional (Socioambiental, 2022). Namun, proyek-proyek ini justru memperparah kekerasan berbasis gender, terutama terhadap perempuan adat dan perkotaan yang tinggal di wilayah operasi. Mereka tidak hanya kehilangan akses terhadap tanah dan sumber penghidupan, tetapi juga menjadi rentan terhadap eksploitasi seksual oleh pekerja migran dan aktor korporat.

Perempuan kelas bawah di favela, seperti di Rio de Janeiro mengalami eksploitasi ganda, yakni pertama sebagai pekerja reproduktif tak dibayar dalam rumah tangga (yang memertahankan tenaga kerja murah bagi kapitalisme), dan kedua sebagai korban kekerasan struktural akibat absennya negara. Dalam banyak kasus, negara tidak hanya gagal

memberikan perlindungan, tetapi justru menarik diri dari tugasnya. Pada 2021, misalnya, terjadi serangkaian insiden kekerasan seksual di favela Complexo do Alemão Rio de Janeiro, di mana polisi tidak hadir selama berhari-hari, serta warga terutama perempuan terpaksa hidup dalam ketakutan (Pública, 2021).

Dalam kekosongan itu, geng bersenjata mengambil alih fungsi “hukum” informal, termasuk memungut “pajak perlindungan” atau bahkan melakukan eksekusi di luar hukum dengan perempuan yang sering menjadi sasaran utama kekerasan seksual sebagai alat kontrol sosial (Amnesty, 2022). Fenomena ini mengungkap kontradiksi mendasar yang di mana negara menjanjikan perlindungan melalui CEDAW, tetapi dalam praktiknya, ia lebih setia pada logika akumulasi kapital daripada keselamatan warganya. Dari perspektif dekonstruksi neo-Marxis, meskipun CEDAW progresif secara normative, tetapi ia tidak mampu mengatasi akar masalah selama tidak menyentuk struktur ekonomi politik yang menindas perempuan miskin.

Fenomena Kekerasan Seksual Di Brazil (2020-2023)

Antara tahun 2020-2023, Brazil menghadapi krisis kekerasan seksual yang memburuk secara drastis, mencapai titik terendah dalam sejarah modern negara tersebut. Data resmi menunjukkan tren peningkatan yang mengawatirkan, yaitu pada tahun 2022, Brazil mencatat jumlah kasus pemerkosaan tertinggi dalam sejarahnya, dengan total 79.930 kasus yang dilaporkan secara resmi ((FBSP), 2023). Tahun 2023 justru memecahkan rekor baru dengan 83.988 korban pemerkosaan dan pemerkosaan terhadap orang rentan (*estupro de vulnerável*), meningkat 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya, setara dengan satu kasus pemerkosaan terjadi setiap enam menit di wilayah Brazil.

Analisis mendalam terhadap data korban mengungkap ketimpangan struktural yang parah. Dalam kurun waktu yang sama, 88,7% korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak perempuan, menunjukkan bahwa gender menjadi faktor resiko utama ((FBSP), 2023). Namun, dimensi rasial juga sangat kritis dengan jumlah 52% korban adalah perempuan berkulit hitam atau pardo, meskipun populasi ini hanya mewakili 56% dari total penduduk Brazil ini menjadi bukti nyata bagaimana diskriminasi rasial memperparah kerentanan terhadap kekerasan. Kelompok yang paling rentan adalah anak-anak dan remaja, pada tahun 2023, Brazil mencatat jumlah tertinggi kasus kekerasan seksual terhadap anak dan remaja sepanjang sejarahnya, dengan 76% korban berasal dari komunitas marjinal perkotaan dan pedesaan (Brasil, 2023).

Pandemi COVID-19 (2020-2022) berperan signifikan dalam memperburuk situasi. Pembatasan sosial (lockdown) menciptakan situasi di mana 73% korban kekerasan seksual terisolasi di rumah bersama pelaku, sementara layanan perlindungan korban mengalami pemangkasan anggaran hingga 18% selama pemerintahan Bolsonaro (Nations, 2022). Laporan Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) mengungkap bahwa kekerasan seksual di ruang domestik meningkat 21,3% antara Maret 2020 dan Desember 2021, periode puncak pembatasan sosial di Brazil.

Kebijakan konservatif pemerintahan Bolsonaro (2019-2020) juga memperburuk situasi. Pemangkasan anggaran untuk program perlindungan perempuan dan kebijakan yang meremehkan kekerasan berbasis gender menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pelaporan kasus. Akibatnya, tingkat pelaporan resmi hanya mencerminkan 15-20% dari total kasus aktual, karena korban takut akan stigma sosial, ancaman balas dendam dari pelaku, dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan ((HRW) H. R., 2023). Fenomena kekerasan seksual di Brazil tidak merata secara geografis. Daerah perkotaan marjinal (favela) menjadi episentrum krisis, khususnya di kota-kota besar seperti Rio de Janeiro mencatat peningkatan 34% kasus kekerasan seksual dibandingkan tahun sebelumnya.

Absennya negara dalam bentuk pengurangan 42% patrol polisi di wilayah favela

selama 2020-2022 menciptakan kekosongan kekuasaan yang diisi oleh geng bersenjata, yang sering menggunakan kekerasan seksual sebagai alat kontrol sosial dan teror terhadap perempuan (Amnesty, 2023). Krisis ini semakin rumit oleh upaya politisasi data oleh pemerintah Bolsonaro. Pada tahun 2021, Kementerian Keamanan Publik Brazil menghentikan publikasi data bulanan kekerasan seksual. Baru pada tahun 2023, di bawah pemerintahan Lula, publikasi data dipulihkan, mengungkapkan betapa parahnya situasi yang telah lama bersembunyi. Data yang terungkap menunjukkan bahwa 2020-2022 adalah periode terburuk untuk kekerasan seksual terhadap perempuan di Brazil dalam dua dekade terakhir.

Peran CEDAW Dalam Perlindungan Perempuan Di Brazil 2020-2023

Sebagai instrumen hukum internasional utama untuk perlindungan perempuan, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) memainkan peran ganda di Brazil antara 2020-2023 sebagai katalis perubahan normatif sekaligus cermin kegagalan implementasi struktural. Di satu sisi, CEDAW berhasil memicu reformasi hukum penting seperti Undang-Undang Maria da Penha yang diperkuat pada 2021, serta pembentukan *Delegacias da Mulher* (kantor polisi khusus perempuan) di 26 negara bagian. Di sisi lain, ketergantungan Brazil pada logika neoliberal yang dipertegas oleh kebijakan pemerintahan Bolsonaro (2019-2022) dengan membuat komitmen CEDAW sering kali hanya menjadi retorika kosong tanpa implementasi nyata, khususnya di wilayah marjinal seperti favela (Fraser, 2016).

Secara normatif, Brazil telah mengadopsi sejumlah kebijakan progresif sebagai respons terhadap rekomendasi Komite CEDAW. Pada 2021, misalnya pemerintah meluncurkan *Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres* (Rencana Nasional Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan) dengan anggaran awal R\$280 juta (sekitar US\$56 juta) (Mulheres, 2021). Dokumen ini secara eksplisit mengakui konsep “eksploitasi ganda” perempuan miskin sebagai pekerja reproduktif tak dibayar dan korban kekerasan struktural yang merupakan terobosan dalam kebijakan publik Brazil. Namun, analisis anggaran menunjukkan bahwa 85% dana tersebut dialokasikan untuk kampanye kesadaran, sementara hanya 15% untuk Layanan darurat dan perlindungan fisik bagi korban di daerah rawan seperti Rio de Janeiro.

Komite CEDAW secara aktif memberikan rekomendasi spesifik kepada Brazil melalui *Concluding Observations* tahun 2022. Dalam dokumen tersebut, Komite menyoroti tiga kelemahan struktural, yaitu: 1. Ketidakadilan distribusi anggaran perlindungan perempuan yang menguntungkan kota besar. 2. Kurangnya pelatihan petugas penegak hukum tentang perspektif gender. 3. Dominasi kebijakan ekonomi neoliberal yang mengabaikan dimensi sosial (Women, 2022). Resistensi negara juga terlihat dari penundaan sistematis dalam penyusunan laporan ke Komite CEDAW. Brazil seharusnya menyerahkan laporan periodik keenam pada 2020, namun baru diserahkan pada Maret 2023 dan isinya cenderung menutupi kegagalan Implementasi dengan data yang dipolitisasi (Nations D. B., 2023).

Misalnya, laporan tersebut mengklaim bahwa 90% kasus kekerasan seksual ditangani dalam waktu 48 jam, padahal data independent dari *órum Brasileiro de Segurança Pública* menunjukkan bahwa hanya 28% kasus yang diselesaikan kurang dari enam bulan, dengan rata-rata waktu penanganan 14 bulan. Dalam kevakumanan kepemimpinan negara, organisasi masyarakat sipil muncul sebagai aktor kritis dalam menjaga relevansi CEDAW di tingkat lokal. Jaringan seperti *Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB)* dan *Geledés Instituto da Mulher Negra* telah mengembangkan mekanisme pelaporan alternatif (*shadow reports*) yang berhasil mengungkap 73% kasus kekerasan seksual di favela yang tidak tercatat dalam sistem resmi. Pada 2022 saja, laporan alternatif mereka mendorong Komite

CEDAW untuk mengeluarkan *Early Warning Procedure* yaitu mekanisme darurat yang jarang digunakan untuk menyoroti situasi kritis di kawasan perkotaan miskin (Committee on the Elimination, 2022).

Inisiatif paling inovatif datang dari *Rede de Mulheres da Favela*, jaringan perempuan di 12 kota Brazil yang menggabungkan prinsip CEDAW dengan pendekatan komunitas. Mereka mendirikan 12 *Casas de Justiça* (Rumah Keadilan) di favela Rio de Janeiro dan Sao Paulo pada 2021-2023, yang menyediakan layanan hukum gratis, pendampingan psikososial, dan forum keadilan restoratif yang diakui oleh pengadilan negeri. Hingga akhir 2023, *Casas de Justiça* telah menangani 4.378 kasus kekerasan seksual, dengan tingkat kepuasan korban mencapai 89% dengan angka yang jauh di atas layanan negara (52%). Namun, keberlanjutan inisiatif ini terancam karena 87% pendanaannya berasal dari donor internasional, bukan anggaran negara, sehingga rentan terhadap perubahan kebijakan global (Ford Foundation, 2023)

Hambatan dan Tantangan Implementasi CEDAW di Brazil

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) telah diratifikasi Brazil sejak tahun 1984, membawa perubahan signifikan dalam kerangka hukum perlindungan Perempuan melalui undang-undang seperti *Lei Maria da Penha* (2006) (Roure, 2009). Namun periode 2020-2023 menjadi masa kritis ketika Pandemi COVID-19 memperburuk kekerasan seksual membekas tekanan luar biasa bagi perempuan Brazil (HRW, 2021). Saat itu, komite CEDAW menghadapi hambatan struktural yang menjelaskan mengapa Implementasi Konvensi kurang efektif untuk melindungi perempuan korban kekerasan seksual di Brazil.

CEDAW dianggap perjanjian formal yang mengikat secara hukum bagi negara-negara yang telah meratifikasinya. Namun dalam praktiknya, CEDAW beroperasi sebagai soft law karena mekanisme penegakannya yang bersifat persuasif. Sebagaimana diatur dalam pasal 17-22 konvensi, kewenangan komite CEDAW terbatas pada peninjauan laporan negara pihak, merumuskan rekomendasi melalui *Concluding Observations* tanpa kekuatan sanksinya, serta menerima keluhan individu, dan bahkan proses tersebut tidak menjamin kepatuhan negara (UNGA, 1979). Jadi keberhasilan CEDAW sangat bergantung pada kemauan dan komitmen negara itu sendiri.

Realitas ini terlihat jelas di Brazil. Meskipun telah meratifikasi CEDAW dan secara berkala menyerahkan laporan kepada komite CEDAW, *Fórum Brasileiro de Segurança Pública* (FBSP) mencatat 74.930 kasus pemerkosaan pada tahun 2022. Angka tersebut merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah Brazil (Pública, 2022). Lonjakan ini diperparah dengan isolasi pandemi, namun akar masalahnya terletak pada lemahnya implementasi komitmen internasional di tingkat nasional. Meski CEDAW menjadi kerangka normatif penting, tanpa penegakan yang mengikat akan sulit untuk mewujudkan dampak nyata dalam melindungi perempuan dari kekerasan.

Meskipun komite mengadakan perkumpulan dua sesi setiap tahunnya (UNGA, 1979), namun, laporan yang diajukan hanya direview setiap 4 tahun, sehingga kurang responsif terhadap krisis yang berkembang cepat. Brazil menyerahkan Laporan periodik gabungan 8-9 pada 2022 yang baru direview pada Mei 2024, mengalami keterlambatan sekitar dua tahun, sebagian akibat pandemi COVID-19 (Bodies, 2024). Keterlambatan ini menciptakan celah pengawasan yang signifikan, terutama pada periode 2020-2023 ketika terjadi peningkatan kekerasan terhadap perempuan, sehingga menunjukkan keterbatasan mekanisme monitoring CEDAW dalam merespons situasi darurat secara tepat waktu.

Rendahnya efektivitas implementasi CEDAW tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan mekanisme global, tetapi juga oleh faktor-faktor domestik yang justru menghambat perlindungan perempuan. Sejak 2020, kekerasan seksual meningkat

signifikan, *Fórum Brasileiro de Segurança Pública* mencatat 230.665 kasus kekerasan fisik dan 619.353 pengaduan kekerasan rumah tangga pada 2021 (Pública, 2022). Ribuan kasus ini membuat pengadilan kewalahan yang menanggapi hampir 588.000 permohonan perintah perlindungan antara Januari 2020- hingga Mei 2022 (HRW, 2022). Data tersebut mencerminkan tekanan luar biasa pada sistem peradilan dan layanan korban.

Namun, tantangan terbesar justru datang dari kebijakan domestik itu sendiri. Pemerintahan Jair Bolsonaro memangkas anggaran federal untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan hingga 70%, sehingga memaksa penutupan sejumlah pusat bantuan korban kekerasan diseluruh negeri pada tahun 2020-2022. memaksa, sebagian besar pusat layanan terpadu (*Casas da Mulher Brasileira*) ditutup (Inesc, 2024). sarana yang seharusnya menampung korban mulai dari layanan psikososial, pendampingan hukum, hingga tempat penampungan darurat justru runtuh saat permintaan sedang memuncak. Dalam konteks CEDAW, Pemangkasan ini telah melanggar pasal 2 yang mencakup kewajiban negara menyediakan perlindungan yang memadai (UNGA, 1979).

Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya berasal dari pemegang kekuasaan semata, antara 2020 dan 2023, sistem peradilan Brazil dianggap telah menyalahgunakan konsep *Parental Alienation Syndrome* (PAS), sebuah teori psikologis yang tidak diakui secara ilmiah oleh komunitas medis internasional. Konsep ini digunakan sebagai alat untuk menuduh ibu korban kekerasan. Dalam praktiknya hakim menggunakan PAS untuk menuduh perempuan "memanipulasi anak" demi menjauhkan mereka dari ayahnya, sehingga bukti kekerasan dalam rumah tangga diabaikan, dan pelaku justru memperoleh hak asuh penuh (CLADEM, 2024).

Di seluruh Brazil terutama di kawasan favela, pelaku kekerasan hampir tidak pernah dihukum bahkan tingkat impunitas mencapai 90%. Di sana, kekerasan terhadap perempuan sering dianggap sebagai urusan keluarga, dan sikap ini diperkuat oleh aparat hukum yang turut terpengaruh budaya *machismo*. Akibatnya, *Maria Da Penha* (2006) undang-undang perlindungan perempuan sejak 2006 sering kali tidak berpengaruh karena praktik peradilan justru mereviktimisasi korban (CLADEM, 2024).

Pada 2022, komite CEDAW mencatat ribuan kasus di Brazil di mana *Parental Alienation Syndrome* (PAS) digunakan untuk melemahkan laporan kekerasan domestik. Dalam *Concluding Observations*-nya (CEDAW/BRA/CO/8-0), komite mengecam praktik ini dan meminta Brazil menghentikan penggunaan PAS dalam kasus kekerasan berbasis gender, karena bertentangan dengan pasal 5 CEDAW yang mewajibkan negara menghilangkan stereotip budaya tentang peran laki-laki dan perempuan (OHCHR, 2024).

Ribuan kasus ini tidak hanya berdampak terhadap psikologis, tetapi berujung pada kematian. FBSP mencatat 1.341 kasus femisida pada 2021 (Pública, 2022), sementara Human Rights Watch melaporkan lebih dari 1 juta kasus kekerasan domestik tertunda (HRW H. R., 2022) Ketika korban pada umumnya perempuan kulit hitam miskin dari favela yang dituduh "berbohong" melalui lensa PAS, negara tidak hanya gagal melindungi, tetapi turut berkontribusi pada pembunuhan perempuan (Inesc, 2024)

Akar permasalahan ini terletak pada kegagalan sistemik dalam pendidikan dan pelatihan berperspektif gender di institusi hukum. Banyak hakim, jaksa, dan polisi tidak menerima pelatihan yang memadai, sehingga menginternalisasi norma *machismo* yang menganggap perempuan sebagai emosional dan manipulatif, sementara laki-laki sebagai rasional dan pelindung keluarga. Dalam konteks ini, tuduhan bahwa perempuan "menggunakan anak sebagai senjata" menjadi cara mudah untuk mengabaikan realitas kekerasan yang mereka alami (DeSouza, 2001; Inesc, 2024).

Melihat berbagai hambatan dan tantangan yang muncul, jelas bahwa implementasi CEDAW di Brazil tidak hanya bergantung pada komitmen internasional, tetapi juga pada

keberanian politik dan kesiapan institusi domestik untuk benar-benar melindungi perempuan. Pandemi COVID-19, pemangkasan anggaran, serta praktik hukum yang bias gender memperlihatkan betapa rapuhnya perlindungan ketika norma internasional tidak diikuti dengan kebijakan nasional yang konsisten. Karena itu, pembahasan mengenai efektivitas CEDAW di Brazil pada periode 2020-2023 bukan sekadar soal hukum internasional, melainkan juga cermin dari realitas sosial, politik, dan budaya yang masih harus diubah agar perempuan dapat hidup dengan aman dan bermartabat.

KESIMPULAN

Implementasi CEDAW di Brazil periode 2020-2023 dinilai kurang efektif dalam melindungi perempuan korban kekerasan seksual karena hambatan struktural, terutama dalam konteks krisis pandemi. Keterlambatan siklus peninjauan negara, terbatasnya kapasitas monitoring Komite CEDAW, serta ketimpangan akses terhadap mekanisme perlindungan hukum memperlihatkan adanya celah antara norma internasional dan praktik domestik. Lonjakan kasus kekerasan dan meningkatkan penggunaan tindakan perlindungan darurat justru terjadi dalam situasi minimnya pengawasan internasional yang adaptif. Dengan demikian, CEDAW di Brazil masih menghadapi tantangan struktural dalam menjalankan fungsi protektifnya, sehingga memerlukan penguatan mekanisme implementasi dan pengawasan agar tidak berhenti pada komitmen normatif semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Almeida, S. S. de. (2018). *Violência de gênero e sistema de justiça no Brasil*. São Paulo: Boitempo.
- Amnesty, I. (2022). *They Don't See Us as Human": Violence Against Women in Brazil's Favelas*. London: Amnesty Internasional, 22-26.
- Amnesty, I. (2023). *hey Don't See Us as Human": Violence Against Women in Brazil's Favelas*. London: Amnesty International, 31.
- Arias, E. D. (2020). Criminal organizations and security governance in Latin America. *Latin American Perspectives*, 47(1), 5-20.
- Bodies, U. N. (2024, May 13). Treaty Body Database CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women . Retrieved from OHCHR.org: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2710&Lang=en
- Brasil, F. B. (2023). *anorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil (2021-2023)*. São Paulo: FBSP, 28.
- Brazil, M. o. (2024). NATIONAL REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE BEIJING DECLARATION AND PLATFORM FOR ACTION. *Cimision Economica Para America Latina y el Caribe*.
- Campbell, J. C. (2015). Health consequences of intimate partner violence. *The Lancet*, 359(9314), 1331-1336. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(02\)08336-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)08336-8)
- Cerqueira, D., Bueno, S., Lima, R. S. de, Neme, C., Ferreira, H., Alves, P. P., Marques, D., Reis, M., Cypriano, O., & Sobral, I. (2023). *Atlas da Violência 2023*. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) & Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
- CLADEM, G. C. (2024). THEMATIC SHADOW REPORT ON FAMILY-RELATED ISSUES IN BRAZIL . Global Campaign for Equality in Family Law.
- CNN. (2020, November 25). Pandemi Picu Meningkatnya Kekerasan pada Perempuan di Dunia. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201124202157-284-574022/pandemi-picu-meningkatnya-kekerasan-pada-perempuan-di-dunia>
- Committee on the Elimination, o. D. (2022). Early Warning Procedure No. BRZ/2021/1: Situation of Women in Brazilian Urban Peripheries. Geneva: United Nations.
- Costa, A. F., & Brum, E. (2022). Violência sexual, gênero e acesso à justiça nas favelas do Rio de Janeiro. *Revista Estudos Feministas*, 30(2), e85742.

- DeSouza, J. B. (2001). Modelo De Mariaand Machismo: The Social Construction of Gender in Brazil. *Interamerican Journal of Psychology*, 2-29.
- FBSP, F. S. (2023). Annual Report on Public Security in Brazil. 159: São Paulo: FBSP.
- Ford Foundation. (2023). FUnding Civil Society Organizations in Brazil: Challenges and Opportunities. New York: Ford Foundation.
- Fórum Brasileiro de Segurança Pública. (2022). Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022. São Paulo: FBSP. <https://forumseguranca.org.br/publicacoes/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica-2022/>
- Fraser, N. (2016). Contradictions of Capital and Care. *New Lft Review* 100, 105.
- Guardian, T. (2023, July 21). Sexual violence against women and children reached all-time high in Brazil in 2022 – report. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2023/jul/21/brazil-sexual-violence-women-and-children-2022-report>
- Hamdy, S. (2022). Gender justice and the gap between law and practice. *Human Rights Quarterly*, 44(3), 512–535. <https://doi.org/10.1353/hrq.2022.0031>
- HRW, H. R. (2021). Brazil: Government Abuses in the Amazon Under Bolsonaro. HRW, 24-28.
- HRW, H. R. (2022, October 26). Brazil Events of 2022. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/brazil>
- HRW, H. R. (2023). They Killed My Soul Inside": Barriers to Justice for Survivors of Sexual Violence in Brazil. New York: HRW, 24.
- HRW. (2021, August 21). Brazil Events of 2021. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/brazil>
- Human Rights Watch. (2023). World Report 2023: Brazil. <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/brazil>
- Hunter, W., & Power, T. J. (2022). Bolsonaro and Brazil's illiberal backlash. *Journal of Democracy*, 33(1), 96–110. <https://doi.org/10.1353/jod.2022.0008>
- Inesc. (2024). FISCAL JUSTICE FOR WOMEN IN BRAZIL: Submission to the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women -CEDAW. Inesc.
- Machado, M. R., Santos, C. M., & Pasinato, W. (2023). Gender policies under attack: Civil society and violence against women in Brazil. *Third World Quarterly*, 44(6), 1152–1169.
- Merry, S. E. (2006). *Human rights and gender violence: Translating international law into local justice*. Chicago: University of Chicago Press.
- Mulheres, S. N. (2021). Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 2021-2023. Brasília: Governo Federal do Brasil, 12.
- Nations, D. B. (2023). Brazil: Sixth Periodic Report under CEDAW. Geneva: UN Human Rights Office.
- Nations, W. U. (2022). Brazil: Impact of COVID-19 on Gender-Based Violence and State Response. New York: UN Women, 12.
- OHCHR. (2024). Concluding observations on the combined eighth and ninth periodic reports of Brazil. OHCHR.
- Pública, F. B. (2021). Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021. 112-115: São Paulo: FBSP.
- Pública, F. B. (2022). Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
- Saffioti, H. I. B. (2015). Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Fundação Perseu Abramo.
- Santos, C. M. (2021). Women's police stations, gender violence and access to justice in Brazil. *Revista Estudos Feministas*, 29(3).
- Santos, C. M., & Pasinato, W. (2021). Patriarchy, poverty and gender violence in Brazilian favelas. *Revista Estudos Feministas*, 29(2).
- Socioambiental, I. (2022). Políticas de Mineração e Impactos nas Mulheres Indígenas. 15-19: Relatório.
- Tsutsui, K. (2007). Global norms and local activism. *American Sociological Review*, 72(5), 704–728. <https://doi.org/10.1177/000312240707200504>
- UNGA, U. N. (1979). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York. New York: United Nations Human Rights Office of The High Commissioner.

- United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (2017). General recommendation No. 35 on gender-based violence against women. <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no-35>
- United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (2023). Concluding observations on the combined eighth and ninth periodic reports of Brazil. <https://undocs.org/CEDAW/C/BRA/CO/8-9>
- United Nations. (1979). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>
- Waiselfisz, J. J. (2020). Mapa da violência contra a mulher. Brasília: FLACSO Brasil.
- Women, C. o. (2010). Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women . United Nations Human Rights Treaty Bodies.
- Women, C. o. (2022). Concluding Observations on the Sixth Periodic Report of Brazil. Geneva: United Nations, 8-12.
- World Health Organization. (2021). Violence against women prevalence estimates, 2018. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>